BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi keuangan daerah adalah suatu sistem pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan atas transaksi ekonomi (keuangan) instansi pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang digunakan sebagai informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawas keuangan, investor, kreditur dan donator, analisis ekonomi dan pemerhati pemerintah daerah, rakyat, pemerintah daerah lain dan pemerintah pusat, yang semuanya termasuk dalam sektor akuntansi keuangan daerah. Dan dalam hal tersebut akan membutuhkan proses pengidentifikasian.

Proses identifikasi pada akuntansi keuangan daerah maksudnya adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, untuk dapat membedakan antara transaksi yang bersifat ekonomi dan non ekonomi. Pada dasarnya, transaksi ekonomi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan uang. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi yaitu mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilaksanakan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Memahami standar akuntansi pemerintahan yaitu sebuah proses

untuk mengerti benar tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku umum dalam rangka penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD sehingga untuk dapat memberikan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Untuk itu sebelum pelaporan keuangan di publik sebaiknya SKPD yang ada pada pemerintah daerah melakukan reviu terhadap laporan keuangan tersebut.

Menurut Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan reviu merupakan prosedur penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan, serta analitik. Reviu terhadap LKPD tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang komprehensif dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Bedanya dengan audit, reviu tidak memberikan opini dan tidak menguji kebenaran substansi dokumen.

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah lembaga atau instansi pemerintahan yang pengelolaan keuangan harus disajikan secara transparansi dan akuntabilitas, dalam arti bahwa proses pengelolaan keuangan dapat di pertanggungjawabkan kepada publik, akan tetapi didalam pelaksanaannya banyak masalah yang sering muncul dalam pengelolaan keuangan yang terjadi, untuk itu reviu Laporan Keuangan yang ada di pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu untuk dilakukan. Hal ini merupakan suatu tantangan bagi Inspektorat Kabupaten Tanah Datar untuk dapat memenuhi kewajiban dalam hal pelaksanaan reviu.

Dalam pelaksanaan reviu Laporan Keuangan, SKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar melakukan tindakan menyusun, mengenali dan pemahaman tentang

proses revidi laporan keuangan tersebut karena itu akan mempengaruhi tindakan untuk kedepannya serta akan mempengaruhi kesiapan SKPD Kabupaten Tanah Datar untuk menghadapi pelaksanaan revidi yang baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Revidi Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akruwal, karena ini diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif, sesuai dengan kegunaan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut. Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 4 Tahun 2018 dapat mengarahkan pelaksanaan revidi di pemerintahan Kabupaten Tanah Datar ke arah yang lebih baik, dengan tujuan dan sasaran yang jelas dan tepat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Keinginan dalam mewujudkan *good governance* merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik agar masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol serta memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Dengan adanya pelaksanaan revidi laporan keuangan untuk mewujudkan *good governance*, dalam hal ini SKPD Kabupaten Tanah Datar melakukan tindakan menyusun, mengenali dan pemahaman agar proses revidi laporan keuangan itu perlu dilakukan. Laporan keuangan pada SKPD ini dilatarbelakangi oleh PP No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan serta Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah datar sekaligus sebagai pengguna anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232 ayat (5) disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), sasaran reviu berupa: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas laporan Keuangan (CaLK) entitas/unit kerja. Hasil kegiatan reviu berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) akan menjadi dasar untuk pimpinan unit kerja dalam membuat surat pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan yang akan disajikannya. Selanjutnya setelah dibuatnya laporan keuangan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan aparat pengawasan intern pemerintah pada pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh gubernur/ bupati/ walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PEMAHAMAN DAN PERSEPSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) TERHADAP REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN DAN TERHADAP KESIAPAN MENGHADAPI PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan menjadi topik bahasan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh pemahaman SKPD terhadap reviu atas laporan keuangan dan terhadap kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan reviu?
2. Bagaimana pentingnya pengaruh persepsi SKPD terhadap reviu atas laporan keuangan dan terhadap kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan reviu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman SKPD terhadap reviu atas laporan keuangan dan terhadap kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan reviu atas laporan keuangan.
2. Menganalisis dan memperoleh bukti empiris mengenai pentingnya pengaruh persepsi SKPD terhadap reviu atas laporan keuangan dan terhadap kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan reviu tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu antara lain:

1. Menambah pengetahuan peneliti mengenai pengaruh persepsi terhadap SKPD menghadapi pelaksanaan revidi atas laporan keuangan.
2. Memberikan tambahan referensi bagi akademisi yang bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai persepsi dan pemahaman SKPD terhadap proses revidi atas laporan keuangan dan pengaruh terhadap kesiapan SKPD dalam menghadapi pelaksanaan revidi.
3. Sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi instansi pemerintahan dalam hal ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Sebagai salah satu syarat dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang: pertama, latar belakang masalah yang berisikan tentang permasalahan penelitian dan mengapa masalah

itu penting dan perlu diteliti. Kedua, rumusan masalah yaitu rumusan tentang masalah yang ada. Ketiga, tujuan penelitian dimana dalam bagian ini mengungkapkan hasil yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Keempat, manfaat penelitian dimana pada bagian ini mengungkapkan pihak atau orang yang akan memperoleh manfaat. Kelima, sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan bab yang berisikan landasan teori yang akan menguraikan teori-teori yang sehubungan dengan permasalahan yang di bahas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, objek penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, metode analisis data, dan kerangka pemikiran.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan pemahaman dan persepsi SKPD terhadap proses reviu atas laporan keuangan dan pengaruh terhadap kesiapan SKPD menghadapi pelaksanaan reviu.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.